

**Analisis Pengaruh PMDN & PMA
Terhadap PDRB di Kabupaten Siak**

**Windi Wardani
Sri Endang Kornita, SE, M.Si.,
Taryono, SE, M.Si**

WardaniWindi92@yahoo.com
Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRACT

This research was conducted in Siak Riau province , to determine the effect of Domestic Investment (DCI) and the Foreign Investment (FDI) to GDP in Siak , and to find out how its contribution to GDP in Siak .

In analyzing the authors use quantitative methods , to determine the effect of variables FDI and domestic investment partially and simultaneously on employment Siak , years 2003-2012 with the technique of multiple linear regression analysis .

The results showed that domestic and foreign, have a significant influence on the Siak GDP in 2003-2012 to 77.1 % influence . Obtain partial test results that are positive and significant effect of FDI to GDP Siak years 2003-2012 . While domestic investment and a significant negative effect on GDP Siak years 2003-2012. Average ICOR PMA Siak from year 2003-2012 amounted to 3.1171 and the average ICOR of domestic capital in the Siak years 2003-2012 amounted to 4.9258 . While the average investment in Siak regency ICOR of the year 2003-2012 amounted to 8.0428 . The ICOR value meant that the use of domestic and foreign investment in 2003-2012 is not fully efficient . This means that the investment can not be used to the fullest and not fully included in the government wisdom supported by investment.

Keywords: PMA, PMDN AND ICOR.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Salah satu indikator penting guna menganalisis ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, kendati indikator ini mengatur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian yang tentang sejauh mana aktifitas ekonomi yang terjadi pada suatu periode tertentu yang telah menghasilkan suatu pendapatan bagi masyarakat, indikasi tersebut tersirat dalam rangka pertumbuhan output karena pada dasarnya aktifitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output) pada gilirannya proses ini juga akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Pembangunan ekonomi dalam suatu daerah atau negara dapat dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonominya dalam jangka panjang yang tercermin dari perkembangan PDRB-nya.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai "motor" sedangkan pemerintah propinsi sebagai koordinator mempunyai

kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, suatu negara memerlukan anggaran dana yang memadai untuk memenuhinya. Terlepas dari status negara yang disandang, baik maju maupun berkembang, setiap negara di dunia ini mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain. Hubungan tersebut termasuk diantaranya arus aliran uang keluar dan uang masuk, dimana uang keluar bisa berupa aliran pinjaman. Sedangkan uang masuk diantaranya bisa berupa devisa, investasi, maupun pinjaman. Dalam rangka peningkatan kegiatan investasi, pengusaha sangat membutuhkan modal yang merupakan kebutuhan pokok dalam kegiatan investasi. Di negara berkembang seperti Indonesia, modal sebagai dasar dalam menggerakkan perekonomian. Modal yang dibutuhkan oleh investor dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam tingkat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi tersebut, pemerintah sering diperhadapkan oleh berbagai macam permasalahan yang timbul dalam perekonomian, seperti tingkat inflasi

yang tinggi, defisit neraca pembayaran, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi dan sebagainya. Dalam menghadapi permasalahan seperti ini, diperlukan suatu kebijakan dalam rangka untuk mengurangi, menghilangkan, atau mencegah timbulnya permasalahan tersebut. Oleh karena permasalahan tersebut secara langsung menyangkut variabel-variabel ekonomi secara agregat, maka kebijakan yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pengeluaran pemerintah daerah. Dimana kebijakan pengeluaran pemerintah daerah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang bertujuan agar tercapainya kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan efisien dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut, dimana harus senantiasa memperhatikan penataan ruang baik fisik maupun sosial tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang melibatkan semua pihak (stakeholder), dimana hasilnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat serta dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum peranan pengeluaran pemerintah daerah yang dibiayai APBD khususnya pengeluaran untuk human capital dan infrastruktur fisik, dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi pada sisi lain pembiayaan dari

pengeluaran pemerintah tersebut dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini sangat tergantung pada sejauh mana produktifitas pengeluaran pemerintah tersebut dan distorsi pajak yang ditimbulkannya, yang mana dalam konteks ini pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi total output (PDRB). Dengan meningkatnya investasi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas untuk menghasilkan output dan nilai tambah, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kapasitas produksi tersebut dapat diperoleh melalui investasi swasta (Private Investment) yang bisa disebut dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA).

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal yang juga penting diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makroekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas. Selain itu kemampuan daerah untuk menunjukan faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan. Siak ditengah kondisi pertanian yang masih seadanya, Pemkab Siak tetap berusaha menjadi

salah satu kabupaten yang bisa memproduksi pangan untuk kebutuhan daerah. Meskipun pada kondisinya, kebutuhan pangan (beras) belum juga tercukupi, karena produksi pangan baru berkisar setengah dari kebutuhan pangan penduduk.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS Teori perhitungan ICOR

Pada awalnya teori perhitungan ICOR ini dikembangkan oleh Sir Roy Harrord dan Evesay Domar atau lebih terkenal dengan Harrord Domar yang intinya menunjukkan bagaimana hubungan antara peningkatan stok kapital dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Semakin tinggi peningkatan stok kapital dan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Semakin tinggi peningkatan stok kapital (k) semakin tinggi pula output yang dapat dihasilkan (QP). Hubungan tersebut digambarkan dengan rumus:

$$QP = h.k$$

Dimana :

$$QP = \text{output}$$

h = koefisien capital output rasio

k = modal

Namun dalam perkembangannya pemakain konsep COR dari Harrord-Domar ini mengalami modifikasi Incremental Capital Output Rasio (ICOR). Dengan menggunakan konsep ICOR ini

akan lebih mudah untuk melihat bagaimana hubungan pertumbuhan ekonomi relatif sebagai akibat dari adanya investasi, terutama untuk menganalisa pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Teori Output (PDRB)

Output adalah hasil yang diperoleh dari pemberdayaan seluruh factor produksi, seperti tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Hasil atau pendapatan yang diperoleh di luar dari pemanfaatan barang modal tidak dimasukkan sebagai output. Misalnya keuntungan dari penjualan barang modal (seperti tanah, gedung dan peralatan) dan pendapatan dari jasa yang dijual kepada pihak lain. (Marhaeni dan Dewi. 2004:56)

Namun demikian, sebenarnya nilai yang diciptakan oleh factor produksi ini tidak sebesar output yang dihasilkan, karena dalam proses produksi diperlukan bahan-bahan baku dan penolong yang merupakan hasil produksi sector lain. Dengan demikian, nilai yang diciptakan factor produksi itu merupakan hasil pengurangan dari output dengan nilai bahan baku dan bahan penolong. Nilai yang diciptakan inilah yang disebut dengan nilai tambah bruto

Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan melihat perkembangan PDRB-nya. PDRB adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun. Dan nilai PDRB dapat dihitung melalui tiga pendekatan (Nanga ; 2001 ; 17), yaitu:

- a) Pendekatan produksi, yaitu nilai PDRB diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang

dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian.

- b) Pendekatan pendapatan, yaitu suatu pendekatan dimana PDRB diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi.
- c) Pendekatan Pengeluaran, yaitu suatu pendekatan dimana PDRB diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan di dalam perekonomian.

Dalam penyajiannya, PDRB selalu dibedakan menjadi 2 yaitu berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan berarti nilai barang dan jasanya berdasarkan atas dasar harga tetap dan biasanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku berarti nilai barang dan jasanya berdasarkan atas harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Dalam perhitungan PDRB, seluruh lapangan usaha dibagi menjadi 9 sektor yaitu Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan, Perdagangan, Listrik gas dan air minum, Bangunan, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa. (Suherman.2000:89)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh Data Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dimana pada penghitungan ini digunakan tahun 2000. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Disamping Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator ekonomi, beberapa ukuran penting lainnya yang diturunkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Subari. 2002:23). yakni :

- a) Produk Regional Bruto merupakan produk domestik regional bruto ditambah dengan pendapatan neto dari luar daerah. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas factor produksi (tenaga kerja dan modal) milik penduduk Kabupaten Siak yang diterima dari luar daerah dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk luar daerah yang diperoleh dari luar Kabupaten siak.
- b) Produk Regional Neto merupakan produk regional bruto dikurangi dengan seluruh penyusutan atas

barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun.

- c) Produk Regional Neto atas dasar biaya factor produksi adalah produk regional neto atas dasar harga pasar yang dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Pajak tidak langsung neto merupakan pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dikurangi dengan subsidi pemerintah. Baik pajak tidak langsung maupun subsidi, keduanya dikenakan terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dijual. Pajak tidak langsung bersifat menaikkan harga jual sedangkan subsidi sebaliknya. Selanjutnya, produk regional neto atas dasar biaya factor produksi disebut sebagai Pendapatan Regional.

Angka-angka perkapita adalah ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan diatas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Teori Investasi

Investasi menurut Sadono Sukirno (2000) adalah pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang.

Investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang Novita (2008:11). Dalam investasi tercakup dua tujuan utama yaitu untuk mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi) dan tambahan penyediaan modal yang ada (investasi netto). Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah seluruh nilai pembelian dari pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industry dan pertambahan dalam nilai stok barang perusahaan yang berupa bahan mentah, barang belum diproses, dan barang jadi.

Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Artinya pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh.

Investasi adalah pengeluaran yang ditambahkan pada komponen barang-barang modal. Kegiatan investasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini kegiatan investasi dapat dibedakan atas investasi otonom dan investasi yang terdorong. Kreteria kredit berdasarkan jangka waktu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Kredit jangka pendek, Kredit yang memiliki jangka waktu maksimum satu tahun. Misalnya untuk membiayai modal kerja, pembiayaan musiman.
- b. Kredit jangka panjang, Kredit yang jangka waktunya lebih dari

satu tahun, contohnya adalah kredit investasi. Dengan demikian pihak perbankan juga dapat melakukan investasi diberbagai sector termasuk terhadap sector transportasi yang dapat menunjang kegiatan perekonomian dan memaksimalkan output sector pertanian yang sangat membutuhkan sarana transportasi yang baik yang tidak hanya didukung oleh pemerintah kota.

Banyak studi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu Negara erat kaitannya dengan tingkat produktivitas penggunaan modal, sehingga penggunaan ICOR untuk pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan produksi dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu ICOR digunakan untuk efisiensi suatu perekonomian dalam menggunakan barang modal. ICOR dapat menunjukkan kecenderungan penggunaan metode produksi (padat modal dan padat karya) dalam suatu perekonomian. Dalam perencanaan makro, ICOR dapat digunakan untuk menaksir besarnya kebutuhan modal yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu.

Menurut M.L.Jhingan (1990:774) Rasio Modal Output adalah suatu alat analisis yang menunjukkan hubungan antara nilai investasi modal dan nilai output. Ia menunjukkan jumlah modal yang diperlukan untuk memproduksi satu unit output. Bila Rasio Modal output dikatakan 5:1, ini berarti

bahwa diperlukan investasi sebesar Rp.5 untuk menghasilkan output sebesar Rp.1. Jadi ia didefinisikan sebagai “suatu hubungan yang ada antara investasi tersebut”. Rasio Modal Output rata-rata dan rasio modal rasio ada dua macam yaitu; Rasio Modal output rata-rata dan Rasio modal output incremental. Rasio modal output rata-rata menunjukkan hubungan antara persediaan modal yang ada dan arus lancar yang dihasilkan. Dengan kata lain ICOR menunjukkan segala sesuatu yang telah diinvestasikan pada masa lalu pada keseluruhan pendapatan. Ratio Modal Output Incremental (ICOR) adalah hubungan antara jumlah kenaikan output yang dihasilkan dari kenaikan input tertentu pada persediaan modal.

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai tingkat modal (investasi) yang dianggap efisien diantaranya : Kurihara mengansumsikan rasio yang efisien untuk negara terbelakang kira-kira 5:1, Singer pada modal perekonomian mengansumsikan 6:1 untuk sektor non pertanian dan menurut HK.Mahmoha Singh yakni sebesar 4:1. Selain itu juga ICOR bisa digunakan (Hera Susanti;dkk:3-37) untuk:

- 1) Menghubungkan besarnya pembentukan modal domestik dengan pertumbuhan PDB
- 2) Menghubungkan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan faktor-faktor produksi
- 3) Menunjukkan efisien tidaknya suatu perekonomian dalam menggunakan barang modal

4) Menunjukkan kecendrungan penggunaan metode produk (padat karya atau padat modal)

5) Dalam perencanaan makro digunakan untuk menaksir besarnya kebutuhan modal yang diperlukan untuk menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal. Penanam Modal Asing dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal asing atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Perusahaan

Penanaman Modal Asing mendapatkan fasilitas dalam bentuk :

- a) pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- b) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- c) pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- d) pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- e) penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- f) keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Kriteria Perusahaan Penanaman Modal Asing yang mendapatkan fasilitas antara lain :

- a) Menyerap banyak tenaga kerja
- b) Termasuk skala prioritas tinggi
- c) Termasuk pembangunan infrastruktur
- d) Melakukan alih teknologi
- e) Melakukan industri pionir
- f) Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu

- g) Menjaga kelestarian lingkungan hidup
- h) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
- i) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi
- j) Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi didalam negeri.

Relatif rendahnya tingkat simpanan dan tipisnya pasar keuangan Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan menggunakan sumber-sumber dalam negeri saja tampak sulit untuk pemenuhan kebutuhan investasi yang sangat tinggi (lihat, sebagai contoh, tulisan Silmy Karim dari Universitas Paramadina, pada harian Jakarta Post, dengan judul “Assessing Benefits of PMA to the Nation”, bulan November 2010).

Dalam bagian ini, kami mencoba untuk memberikan ikhtisar akan tren-tren terakhir PMA ke Indonesia dan menguraikan beberapa pendorong utamanya. Bagian ini juga menyoroti cakupan dari upaya kebijakan dalam negeri, sebagai contoh, untuk meningkatkan konektivitas, iklim investasi dan keterampilan, yang tidak hanya dapat secara langsung meningkatkan prospek pertumbuhan tetapi juga dapat menarik PMA yang lain, sehingga dapat menciptakan suatu lingkaran peningkatan PMA dan pendapatan dalam negeri yang bijak.

HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang kebenarannya masih perlu dibuktikan atau diuji secara empiris. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka hipotesis yang menjadi pedoman awal dalam penelitian ini adalah:

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Siak
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) mempunyai struktualisasi yang efektif untuk PDRB di Kab.Siak

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan periode pengamatan tahun 2003-2012. Dipilihnya kabupaten ini karena penggunaan lahan dominan di kabupaten Siak adalah untuk perkebunan, penelitian ini juga didasarkan pada ketersediaan data yang berhubungan dengan sub sektor perkebunan yang dimiliki Kabupaten Siak dengan demikian sehingga memudahkan peneliti dalam menghimpun data.

Penelitian dilakukan mulai bulan oktober 2013 s/d September 2014.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk *time series* dengan periode pengamatan tahun 2003-2012. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Riau dan Badan Penanaman dan Investasi Provinsi Riau

dalam beberapa tahun terbitan, serta literatur-literatur dan informasi-informasi tertulis baik yang berasal dari instansi terkait maupun internet yang berhubungan dengan topik.

3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode studi pustaka dalam pengumpulan data, yakni dengan melakukan pencatatan langsung data yang diperlukan, baik mendatangi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau dan Kabupaten Siak maupun melakukan telaah terhadap berbagai literatur seperti buku, jurnal, media cetak serta laporan-laporan ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

Identifikasi Variabel

Pada dasarnya ada dua jenis variabel yang penulis pergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Variabel terikat, merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variasi yang dialami oleh variabel bebas. Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah PDRB Kabupaten Siak.
2. Variabel bebas, merupakan variabel yang akan mempengaruhi nilai variabel terikat dari variasi atau perubahan yang dialami variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah PMDN dan PMA.

Definisi Operasional Variabel

Pengertian dan batasan-batasan variabel-variabel

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

PMDN (X1)

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan nilai realisasi investasi kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang di Kabupaten Siak dalam kurun waktu 2002-2012.

PMA (X2)

PMA (Penanaman Modal Asing) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan nilai realisasi investasi asing yang memperoleh fasilitas dari pemerintah yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang di Kabupaten Siak dalam kurun waktu 2002-2012.

PDRB (Y)

3. PDRB adalah total PDRB (Y) di kabupaten Siak dari tahun ke tahun dalam rupiah (Rp).

4. Metode Kuantitatif

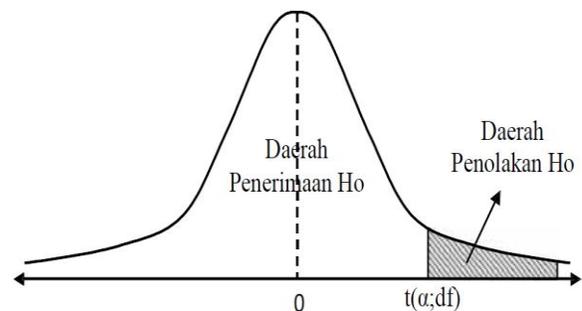
5. Untuk mengetahui pengaruh variabel investasi PMA dan investasi PMDN secara parsial dan serempak terhadap kesempatan kerja Kabupaten Siak, tahun 2002-2011 digunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:

6. $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_i$
.....
..... (1)
7. Keterangan :
8. Y = PDRB Kabupaten Siak
9. X_1 = PMDN
10. X_2 = PMA
11. β_{1-2} = Koefisien regresi
12. β_0 = Intersep
13. e_i = Variabel Penganggu
14. Sebelum menguji dan menganalisa data dengan bantuan *software* SPSS (*Statistical Package for Social Science*) menurut Gujarati (2010:112), perlu dilakukan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui
15. hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinearitas dan heterokedastisitas. Uji asumsi klasik ini digunakan agar dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bisa jika telah memenuhi syarat *BLUE (Best Linier Unbiased Estimator)* yakni tidak terdapat multikolinearitas dan heterokedastisitas, dengan menggunakan hasil analisis komputer dari program SPSS maka dapat digunakan untuk menguji model ada tidaknya multikolinearitas dan heterokedastisitas.

Menguji pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap

PDRB di Kabupaten Siak.

- a. Rumusan hipotesis
 $H_0 : \beta_2 = 0$, artinya Penanaman Modal Asing (PMA) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Siak.
 $H_1 : \beta_2 > 0$, artinya Penanaman Modal Asing (PMA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Siak.
- b. Menentukan taraf nyata $\alpha = 5 \%$, dengan derajat kebebasan $df = (n - k)$, untuk menentukan besarnya $t_{\text{tabel}} = t_{\alpha, (n - k)}$.
- c. Kriteria pengujian
 H_0 diterima jika : $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$
 H_0 ditolak jika : $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$
- d. Untuk daerah pengujianya, seperti yang terlihat pada Gambar. 4:



Apabila diperoleh nilai $t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Siak. Sebaliknya jika diperoleh $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima ini berarti bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Siak.

Analisis ICOR

1. Untuk mengukur efisiensi penggunaan investasi sektor perekonomian di Kabupaten Siak dari Tahun 2003-2012 digunakan rumus ICOR dengan menggunakan lag time selama 10 tahun sebagai berikut :

$$ICOR = \frac{\Delta I}{\Delta Y}$$

Dimana :

ICOR = Hubungan yang menunjukkan antara investasi yang dilakukan dengan PDRB yang dihasilkan

ΔI = Perubahan investasi

ΔY = Perubahan PDRB

Nilai ICOR yang dianggap memiliki efisiensi yang baik adalah antara 3-4 (Widodo), semakin tinggi nilai ICOR memberikan indikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi penggunaan investasi.

2. Untuk menganalisa perkembangan investasi sektor perekonomian di Kabupaten Siak dari Tahun 2003-2012 digunakan rumus pertumbuhan sebagai berikut (Jarwanto, 1982:244):

Dimana:

Pt = Perkembangan investasi sektor n

Pn = Jumlah investasi sektor n

P(n-1) = Jumlah investasi tahun ke n-1 atau tahun sebelumnya

3. Untuk mengetahui prospek investasi pada tahun-tahun yang akan datang digunakan rumus Trend Linier sederhana dengan formula sebagai berikut :

$$Y = a + bxi$$

Dimana :

Y = Nilai trend investasi yang ditaksir

a = Nilai trend periode tahun dasar (konstanta)

b = Koefisien trend regresi

xi = Periode waktu

Untuk mencari nilai a dan b dipakai rumus sebagai berikut:

Keterangan :

a = Nilai trend tahun dasar / konstanta

Σy = Jumlah nilai trend investasi

n = Jumlah periode waktu

Analisis koefisien determinasi (R²)

Menurut Gujarati (2010:10) koefisien determinasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya variasi perubahan variabel terikat yaitu PDRB di Kabupaten Siak (Y) dipengaruhi oleh variabel bebas PMDN (X1), dan PMA (X2). Nilai R² dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS} \dots\dots\dots(7)$$

$$RSS = b_1 \sum X_1 \cdot y + b_2 \sum X_2 \cdot y + b_3 \sum X_3 \cdot y \dots\dots\dots(8)$$

$$TSS = \sum Y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n} \dots\dots\dots(9)$$

$$ESS = \sum Y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n} - RSS \dots\dots\dots(10)$$

Keterangan :

ESS = *Explained Sum of Square*

TSS = *Total Sum of Square*

RSS = *Residual Sum of Square*

HASIL PENELITIAN

5.1.1. Pengaruh PMA terhadap PDRB

Hasil pengujian menunjukkan PMA memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Siak tahun 2003-2012. Artinya adalah semakin besar PMA maka PDRB semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa koefisien dari variabel PMA adalah sebesar 0,136. Artinya setiap peningkatan PMA sebesar Rp. 1.000.000, maka akan meningkatkan PDRB sebesar Rp. 136.000. PMA mempunyai korelasi positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Siak. Konsumsi masyarakat yang suka barang-barang luar yang berdaya saing tinggi dan kompetitif dan terjadi kenaikan hasil output yang meningkatkan PMA dan dapat meningkatkan tingkat PDRB yang diperoleh dari keuntungan PMA yang dilaksanakan.

Penanaman Modal Asing (PMA) diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai kegiatan yang belum mampu sepenuhnya dilaksanakan dengan PMDN, terutama yang menghasilkan barang modal, bahan baku dan komponen sebagai substitusi impor, barang jadi dan barang setengah jadi guna menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja. Investasi khususnya penanaman modal jangka panjang (PMA) merupakan sumber utama

pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Terutama sektor-sektor ekonomi yang secara potensial bisa sangat produktif dan bisa diandalkan sebagai sumber devisa.

PMA sebagai salah satu sumber penggerak pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran serta pemerintah. Selama masa Orde Baru, pertumbuhan arus masuk PMA ke Indonesia memang sangat pesat, terutama pada periode 80-an dan bahkan mengalami akselerasi sejak tahun 1994. Tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan investasi dan PMA pada khususnya di Indonesia selama era Soeharto tersebut didorong oleh stabilitas politik dan sosial, kepastian hukum, dan kebijakan ekonomi yang kondusif terhadap kegiatan bisnis di dalam negeri, yang semua ini sejak krisis ekonomi 1997 hingga saat ini sulit sekali tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, perkembangan sektor industri yang pesat yang mendorong terjadinya perubahan ekonomi secara struktural dari sebuah ekonomi berbasis pertanian ke sebuah ekonomi berbasis industri selama era Orde Baru tidak lepas dari peran PMA (Afia, 2010).

Hasil survei tahunan terhadap perusahaan-perusahaan *Report 2007-2008* memperlihatkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi pengusaha-pengusaha di Indonesia, diantaranya yaitu infrastruktur yang buruk (dalam arti kuantitas terbatas dan kualitas buruk), birokrasi pemerintah yang tidak efisien, serta keterbatasan akses keuangan (Afia, 2010). Buruknya infrastruktur dengan sendirinya meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya menurunkan daya saing harga dengan konsukwensi ekspor menurun. Konsukwensi lainnya adalah menurunnya niat investor asing (PMA) untuk membuka usaha di dalam negeri, dan ini

pasti akan berdampak negatif terhadap produksi dan ekspor di dalam negeri. Ketiga adalah masalah birokrasi yang tercerminkan oleh antara lain prosedur administrasi dalam mengurus investasi (seperti perizinan, peraturan atau persyaratan, dan lainnya) yang berbelit-belit dan langkah-langkah prosedurnya yang tidak jelas. Ini juga merupakan masalah klasik yang membuat investor enggan melakukan investasi di Indonesia. Hal ini tercermin pula pada masalah koordinasi antara pemerintah daerah. Banyak peraturan pemerintah atau keputusan presiden tidak bisa berjalan efektif karena adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semuanya merasa paling berkepentingan atas penanaman modal di daerah.

Dalam kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam bidang penanaman modal. Namun, sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat terpaksa mengeluarkan kepres khusus mengenai penanaman modal karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang ingin membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses pengurusan izin usaha. Investor seringkali dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar.

5.1.2. Pengaruh PMDN terhadap PDRB

Berdasarkan hasil pengujian, PMDN memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Siak tahun 2003-2012. Artinya adalah semakin besar PMDN maka PDRB semakin menurun. Hasil penelitian ini menolak hipotesis sebelum dimana PMDN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa koefisien dari variabel PMDN adalah sebesar -0,04. Artinya setiap peningkatan PMDN sebesar Rp. 1.000.000, maka akan menurunkan PDRB sebesar Rp. 40.000. PMDN mempunyai korelasi negatif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Siak. Hal ini disebabkan oleh daya saing yang menurun dan produk dalam negeri yang kurang kompetitif dan menyebabkan output menurun yang dapat menurunkan tingkat PDRB.

Menurut Basuki dalam Afia (2010), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menarik para investor. Pertama, para investor biasanya sangat peka terhadap lingkungan sosial, politik, hukum, dan sistem birokrasi suatu daerah. Oleh sebab itu, iklim investasi harus dibangun sekondusif mungkin. Kedua yaitu kebijakan pemerintah. Jika pemerintah dan kebijakannya tidak ramah terhadap investasi, menyebabkan sangat sulit aliran investasi masuk ke dalam perekonomian, karena para investor selalu memantau peran suatu pemerintah dalam sistem ekonomi. Ketiga, yaitu lembaga pelayanan yang bertanggung jawab serta berwenang langsung terhadap investasi, sangat perlu melakukan program proaktif dalam mempromosikan keunggulan daerahnya sehingga terjadi peningkatan daya tarik investasi. Keempat, merupakan hal terpenting yaitu

peran pemerintah daerah secara aktif dan maksimal. Pemerintah daerah harus bersaing secara baik untuk meraih investasi domestik.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah erat kaitannya dengan tingkat produktifitas penggunaan modal, sehingga penggunaan ICOR untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan faktor produksi dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu ICOR digunakan untuk menunjukkan efisiensi suatu perekonomian dalam menggunakan barang modal. ICOR dapat menunjukkan kecendrungan metode produksi (padat modal dan padat karya) dalam perekonomian. Dalam perencanaan makro, ICOR dapat digunakan untuk menaksir besarnya kebutuhan modal yang diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi tertentu.

Rata-rata ICOR PMA di Kabupaten Siak dari tahun 2003-2012 sebesar 3,1171. Dan rata-rata ICOR PMDN di Kabupaten Siak dari tahun 2003-2012 sebesar 4,9258. Sedangkan rata-rata ICOR investasi di Kabupaten Siak dari tahun 2003-2012 sebesar 8,0428. Nilai ICOR ini memberikan makna bahwa penggunaan investasi dari tahun 2003-2012 belum sepenuhnya efisien. Ini berarti bahwa investasi tersebut belum dapat digunakan secara maksimal serta belum sepenuhnya didukung oleh kebijaksanaan pemerintah dalam kegiatan investasi yang masih

dipersulit. Dan dari hasil tersebut diketahui bahwa penggunaan investasi yang lebih efisien adalah PMA.

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis linier berganda selama periode 2003-2012, PDRB di Kabupaten Siak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun berbeda dengan PMA dan PDRB yang perkembangannya fluktuatif setiap tahunnya. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa PMA dan PMDN memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Kabupaten Siak tahun 2003-2012 dengan pengaruh sebesar 77,1 %. Pengujian secara parsial memperoleh hasil bahwa PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Siak tahun 2003-2012. Sedangkan PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Siak tahun 2003-2012.

2. Rata-rata ICOR PMA di Kabupaten Siak dari tahun 2003-2012 sebesar 3,1171. Dan rata-rata ICOR PMDN di Kabupaten Siak dari tahun 2003-2012 sebesar 4,9258. Sedangkan rata-rata ICOR investasi di Kabupaten Siak dari tahun 2003-2012 sebesar 8,0428. Nilai ICOR ini memberikan makna bahwa penggunaan investasi dari tahun 2003-2012 belum sepenuhnya efisien. Ini berarti bahwa investasi tersebut belum dapat digunakan secara maksimal serta belum sepenuhnya didukung oleh kebijaksanaan pemerintah

dalam kegiatan investasi yang masih dipersulit.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang bisa diberikan terkait hasil penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) melalui kebijakan menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri, memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang serta mempermudah peraturan dalam berinvestasi sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.
2. Penelitian hanya membahas pengaruh PMA dan PMDN terhadap PDRB Kabupaten Siak. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi PDRB Kabupaten Siak berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Priyo Hari. 2006. "Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pabdapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)". Padang.

Afia, Elvany Noor, 2010. Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.

Bambang Kustitunto dan Istikomah.1999."Peranan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia". Perpustakaan BAPPENAS 2009: Jakarta.

Fhino Andrea Cristy dan Priyo Hari Adi. 2006. "Hubungan Antara Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia". Membuktikan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali.

Effendi dan Soemantri, 2003. "Dampak PMA, tetapi PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia tahun 1987-200(26 propinsi) ". Fakultas Ekonomi UPN"veteran" Yogyakarta.

Gujarati, Damodar. 2010, *Econometric*, Erlangga, Jakarta.

Hariyanto. 2005. "Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun Anggaran 2000-2002". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Jakarta.

Hendar, Kusnadi. 2002. *Ekonomi Koperasi*. Edisi Revisi : FEUI. Jakarta.

Hudiyanto, 2011.*Pengantar Ekonomi Pembangunan*. UII Press. Yogyakarta.

- Jhingan. M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi 1. Cetakan 10. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- _____, 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mankiw, N.G. 2006 . *Makro Ekonomi*. Edisi 6. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Marhaeni, dan Manuati Dewi. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Buku Ajar Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali.
- Moh. Nazir, 2003. *Metode penelitian : 9*, Ghalia Indoneia, Jakarta.
- Muana, Nanga. 2001. *Makroekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, Subari. 2002. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Putong, Iskandar. 2010. *Economics pengantar mikro dan makro*. Jilid 1 : Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rosyidi, Suherman.2000. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Sadono, Sukirno. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah Dan Dasar Kebijaksanaan*. FEUI, Jakarta.
- _____. 2002. *Pengantar Teori, Makro ekonomi*. Edisi 3 : Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2007, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____. 2008, *Mikro ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2004, *Makro ekonomi : Teori Pengantar*. Edisi 15 Rajagrafindo Ketiga. Jakarta.
- Silmy, Karim. 2010. *Assessing Benefits of PMA to the Nation Nation*. Jakarta.
- Suahasil Nazara. 1997 . *Penelitian Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia*. Prisma LP3ES, Jakarta.
- Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin. 2005, *”Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (studi kasus pada 26 Propinsi Di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi)”*. Universitas Semarang. Semarang.
- _____. 2008. *Determinan Investasi di Daerah: studi Kasus Provinsi di Indonesia*. Dengan metode *Error-Correction Model (ECM)”*. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Statistik Investasi Provinsi Riau. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau. Pekanbaru.
- Subekti. 2004. *”Analisis Peran dan Dampak Utang Luar Negri, PMA, PMDN, dan Tabungan pemerintah Terhadap PDB*

- Indonesia. Metode penaksiran model yang digunakan regresi berganda Ordinary LeastSquare (OLS)”. Universitas Diponegoro, Yogyakarta.*
- Suryawati. 2000. *Peranan Investasi Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia Timur.* Universitas Diponegoro. Yogyakarta.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi.* Baduose Media, Padang.
- Timtim, Suryani. *Analisis Peran Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang (Analisis Tabel Input Output Kabupaten Pemalang Tahun 2010.* Economics Development Analysis Journal 2 (1) (2013). Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid 1 Edisi Kedelapan.* Erlangga, Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2008. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Kesembilan.* Erlangga: Jakarta.
- Trisnu & Purbadharmaja. 2013. *Pengaruh PMDN Dan PMA Terhadap Pdrb Di Provinsi Bali.* Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Bali.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 *Tentang Penanaman Modal Asing.*
- Undang-undang No 25 tahun 2007, pasal 1 ayat 2 *Penanaman modal dalam negeri.*
- Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang *Penanaman Modal Penanam Modal Asing.*
- Undang-Undang No. 34 tahun 2008 tentang *Pemekaran Daerah di Provinsi Riau.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2008 tentang *Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.*
- Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 *Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.*